

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POLSEK DALAM PENAGANAN KEMACETAN LALU LINTAS DI JALAN RAYA CIAWI

Petrus Boga, Denny Hernawan, Ginung Pratidina

Program Study Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik
dan Komunikasi
Universitas Djuanda Bogor

ABTRAK

Kemacetan lalu lintas adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota kota besr. Berdasarkan hasil observasi di lapangan hambatan samping yang terjadi di Kawasan jalan raya Ciawi disebabkan oleh: Aktivitas pengendara yang sering berwisata ke arah puncak Bogor, Kendaraan masuk dan keluar dari lahan di samping jalan, Teknisi kebijakan jalur jalan raya Ciawi-Puncak Bogor, Tidak meratanya jalan trotoar bagi pejalan kaki, Tidak meratanya jalan trotoar bagi pejalan kaki. Dengan pembobotan untuk setiap pilihan jawaban, hasil penelitian keseluruhan dimensi yang diukur menunjukkan implementasi kebijakan polsek dalam menagani kemacetan jalan raya ciawi di kategorikan baik. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif yang diterapkan dengan menggunakan rumus statistik untuk membantu menganalisis data yang diperoleh dari responden. Penelitian menemukan bahwa setiap dimensi menerima nilai rata-rata 4,22 dan berada dalam kategori "Baik". Oleh karena itu, Pemerintah Bogor bekerja sama dengan Polsek Ciawi sebagai implementator kebijakan dan strategi membuat terminal Bus dan angkot yang strategis guna mengatasi kemacetan yang sering terjadi. Polsek Ciawi perlu menciptakan sebuah sistem dimana sistem itu mengatur sanksi terkait dengan parkir liar baik kendaraan lintas maupun mobil penumpang (Taksi, Angkot serta Bus), Pemerintah daerah perlu membuat trotoal terutama didepan pasar ciawi yang sering mengalami kemacetan akibat penebrangan dan parkir liar, Perlu adanya pelebaran jalan untuk mengurangi kemacetan lalulintas sekitar jalan raya ciawi.

Kata kunci: Strategi, sikap dan tindakan petugas polisi dalam pelaksanaan penaganan kemacetan di jalan raya Ciawi,

PEDAHULUAN

Kemacetan lalu lintas adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi

kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota kota besar, terutamanya yang tidak mempunyai transportasi public atau system lalu lintas yang tidak baik atau memadai ataupun juga tidak seimbangnya kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk. Kemacetan lalu lintas disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu perbandingan jumlah kendaraan dengan ruas jalan yang tersedia tidak seimbang, jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat, parkir liar, kurang maksimalnya penggunaan transportasi umum, dan adanya kecelakaan lalu lintas. Selain itu, pengguna jalan yang tidak tertib pada peraturan lalu lintas juga dapat menyebabkan kemacetan. Seiring berjalannya waktu, kemacetan lalu lintas menjadi masalah yang cukup serius. Hal ini dikarenakan kemacetan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti pemborosan bahan bakar, pemborosan waktu dan polusi udara. Biasanya kemacetan terjadi di daerah-daerah yang dekat dari fasilitas umum seperti sekolah, pasar, terminal bus, stasiun kereta api, persimpangan kereta api hingga lampu merah (traffic lights). Terjadinya bencana seperti banjir, kecelakaan, kebakaran atau yang lainnya juga dapat menjadi salah satu masalah terjadinya kemacetan di sekitar area yang terdampak. Dengan demikian maka implementasi kebijakn menjadi sala satu jalan untuk mengurangi kemacetan di jalan raya agar tidak terganggu dalam aktivitas pengendalian dan juga pejalan kaki. Maka itu, Implementasi kebijakan ini menjadi persoalan yang sering dihadapi di Negara Indonesia. Salah satu diantaranya adalah yang terkait dengan penerapan peraturan tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, dibutuhkan kerjasama yang serius antara pemerintah daerah dan masyarakat sekitar. Implementasi kebijakan menentukan apakah kebijakan aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan uotcome seperti yang direncanakan. Dalam konteks administrasi, pencapaian sasaran seperti itu disebutnya efektif. Dalam konteks di atas, implementasi kebijakan dilakukan oleh aparat dan

pejabat pelaksana kebijakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai. Pembangunan nasional dan integrasi nasional bisa berjalan dengan baik dengan pada sistem transportasi dan lalu lintas yang nantinya juga menjadi upaya memajukan kesejahteraan umum. Indonesia dengan kepadatan penduduk yang terus bertambah, diikuti dengan kebutuhan orang yang semakin banyak, serta teknologi yang semakin maju dan canggih. Hal itu menjadi implikasi meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor, serta menjadikan meningkatnya volume pengguna jalan di setiap jalanan. Maka dari pada itu seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sebagai negara hukum, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sudah selayaknya sebagai negara hukum, segala sesuatu tindakan-tindakan masyarakat Indonesia baik dalam kehidupan bernegara atau bermasyarakat sudah diatur oleh hukum. Sehingga hukum di Indonesia itu bersifat tegas dan memaksa, agar tercipta kedisiplinan serta kepatuhan antara masyarakat dengan aturan-aturan atau perundang-undangan yang berlaku Sehingga perlu adanya peraturan yang mengatur dalam aspek transportasi dan lalu lintas. agar tercipta tertib berlalu lintas. Dasar Hukum berlalu lintas yaitu berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut, pemerintah dalam hal ini, pihak administrasi seperti kepolisian diberi wewenang untuk menindak perilaku pelanggaran bagi pengguna lalu lintas Berdasarkan hasil observasi di lapangan hambatan samping yang terjadi di Kawasan jalan raya Ciawi disebabkan oleh; *Pertama*, aktivitas pengendara yang sering berwisata ke arah puncak Bogor, *Kedua*, kendaraan bermotor yang terhenti di badan jalan, *Ketiga*, Kendaraan masuk dan keluar dari lahan di samping jalan, *Keempat*, teknisi buka – tutup

jalur jalan raya Ciawi-Puncak Bogor, *Kelima*, tidak meratanya keberadaan jalan trotoar bagi pejalan kaki.

Untuk mengelola penyelenggaraan lalu lintas yang aman dan tertib sebenarnya Pemerintah Kabupaten Bogor sudah dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terkait focus penelitian skripsi ini ada sejumlah pasal dalam Perda tersebut yang dinilai relevan, sebagai berikut: Pasal 14 Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, serta pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan. A. Manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan: (1) usaha peningkatan kapasitas ruas jalan, persimpangan, dan/atau jaringan jalan; (2) pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu; (3) penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda; dan/atau (4) penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan. Berdasarkan gambaran dalam latar belakang diatas maka penelitian ini mengambil judul, “Analisis Implementasi Kebijakan Polsek Terhadap Kemacetan Lalu Lintas Di Kawasan Jalan Raya Ciawi”.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul yang penulis menganalisis yaitu “Analisis Implementasi Kebijakan Polsek Terhadap Kemacetan Lalu Lintas di Kawasan Jalan Raya Ciawi maka penelitian dilakukan dengan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme. Pendekatan penelitian kualitatif disebut juga dengan pendekatan penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada objek yang alamiah yaitu objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran penelitian tidak mempengaruhi dinamika tersebut.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau interview adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan untuk mendapatkan informasi tentang fokus penelitian yang diteliti penulis.

Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.

Metode kuisisioner.

Jumlah pertanyaan yang di susun dalam bentuk tulisan untuk mendapatkan data yang di perlukan dari jawaban responden secara tertulis, ada pun jenis kuisisioner yang digunakan adalah kuisisioner tertutup yang sudah sediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih.

Metode dokumentasi.

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian maka analisis Implementasike bijakan polsek dalam penanganan kemacetan lalu lintas di jalan raya ciawi menunjukan hasil akhir penelitian dengan nilai rata-rata 4,22 dengan kriteria penelian “sangat Baik”. Analisis variabel implementasi kebijakan penanganan polsek dari empat dimensi mempunyai skor nilai tertinggi dari semua dimensi-dimensi. Skor nilai tertinggi keempat dimensi tersebut yaitu dimensi komunikasi dengan nilai rata rata 4,34, dimensi sumber daya dengan nilai rata-rata 4,05 , dimensi disposisi dengan nilai rata-rata 4,04 dan dimensi struktur

birokrasi dengan nilai rata rata 4,45. Semua dimensi dengan nilai kriteria “sangat Baik”, dalam ke empat dimensi ini terdapat sepuluh indicator indicator masing-masing indikator mempunyai satu item pertanyaan yang menunjukkan bahwa berdasarkan wawancara baik dengan pihak polsek maupun pihak lain dan berdasarkan juga hasil observasi, diketahui bahwa di polsek telah melaksanakan tugas dan fungsinya amasing masing dengan sangat baik dalam penaganaa kemacetan di jalan raya ciawi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat dianalisis bahwa implementasi penanganan kemacetan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah nomr 5 tahun 2007 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan akutan jalan untuk itu para anggota polsek atau unit lintas yang selalu melaksanakan pekerjaanya sesuai dengan ketentuan tertentunya, dan sudah melaksanakan bekerja dengan tanggung jawab dan bekerjasama dengan baik antara pelaksana di lapangan maupun intansi. Dan ini sesuai dengan pendekatan implementasi pelaksanaan penanganan kemacetan yang dirumuskan oleh George Edward III meliputi empat dimensi pendekatan yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Stuktur Birokrasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Analisis implementasi kebijakan Polsek dalam penanganan kemacetan lalu lintas di jalan raya ciawi telah dilaksanakan dalam katagori “Baik” dengan hasil skor akhir nilai rata-rata 4,22 dalam artian para anggota polsek hal ini terlihat bahwa sudah melakukan tugas pokok dan fungsi dengan Baik. Selain itu, dengan adanya observasi dan wawancara, implementasi kebijakan polsek dalam penanganan kemacetan lalu linta di jalan raya ciawi. maka Personil unit lintas Polsek Ciawi dan dibantu oleh Dishub Bogor selalu hadir ditengah-tengah Masyarakat walaupun sumberdaya yang

terbatas untuk memberikan pelayanan prima kepolisian salah satunya dengan melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas, demi kelancaran dan kenyamanan pengguna jalan serta meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pengaturan arus lalu lintas pagi dan sore hari pada saat jam sibuk berangkat maupun pulang kerja, merupakan bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang terus ditingkatkan, untuk membantu penyebrangan jalan dan pengaturan arus lalu lintas baik di pasar ciawi, di depan sekolah maupun di perempatan jalan pada saat mulainya aktivitas pagi masyarakat umum maupun pulang dari kerja.

REFRENSI

BUKU :

A.Muri Yusuf, (2014) *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Anderson, J. E. (1979). *Public Policy-Making (Second Edition ed.)*. Holt, Rinehart, and Winston: New York. Andi Prastowo. 2010. *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: DIVA Press. Diakses pada 1 Juli 2023.

Bauer, J. (2003) *Role Ambiguity and Role Clarity* . Celemont: A Comprasion Attitudes in Germany and United States.

Carl Van Horn dan Donal Van Meter , (1975) *Model-model dalam Kebijakan Implementasi*, yongyakarta

Darmadi, Hamid (2011). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung : Alfabeta

Hanim, Masayu S. (2003) *Sistem Jaringan Pembuatan Kebijakan Publik yang Berdampak Penyalahgunaan Lahan di Kawasan Jabopunjur*. LIPI, Jakarta.

Heinz Weirich and Harold Koontz, (1993) *Management; A global Perspective, Tenth Edition, Mc graw Hill Inc.*

Lexy J. Moleong, (2006) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.

Moh Nazir, (2005) *Jenis-jenis dan desain penelitian oprasional : rosposytori STEY. Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Bandung: NilaCakra.

Nanang Martono, (2010) *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta. Rajawali Pers Oktasari.

Noeng Muhadjir, (2002) *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV*. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin.

Sugiyono. (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.

Winarno, B. (2012) *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS. Yin, R.K.

Sugiyono A. (2001) *Analisis Manfaat dan Biaya Sosial*. Program Pascasarjana Magister Sains dan Doktor. Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Yusuf, A. M. (2014) *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Yunus, Hadi Sabari, (2010) *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: S, K. (2013).

JURNAL :

Anabillah Yulia Ramadhani (artikel). *Faktor-Faktor Pendorong Penyebab Terjadinya Kemacetan (Studi Kasus : Kawasan Sukun Banyumanik Kota Semarang)*. Diakses pada 1 Juli 2023.

Adnan, M.A., Barbara, G. dan Ratri, C (2014). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Growth, dan Free Cash Flow Terhadap Dividend Payout Ratio Perusahaan dengan*

mempertimbangkan *Corporate Governance* sebagai *Variabel Intervening*. JAAI. Vol. 18. No. 2. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dea Siti Hilmiyah Halawi¹(2016) Analisis Kinerja Pegawai Bidang Pengendalian dan Penertiban (daltib) pada Dinas Lalulintas dan Angkutan Jalan dalam Mengatasi Kemacetan di Kota Bogor. Jurnal governansi issn 2442-3971. Diakses pada 13 Juli 2023

Hanim, Masayu S. (2003) Sistem Jaringan Pembuatan Kebijakan Publik yang Berdampak Penyalahgunaan Lahan di Kawasan Jabopunjur. LIPI, Jakarta. Diakses pada 3 Juli 2023.

Hotanices, T. B. (2015) Peranan Kepolisian Satuan Lalu Lintas dalam Menangani Tingginya Tingkat Pelanggaran Oleh Kendaraan Bermotor Diwilayah Polisi Resort. *Role - Traffic Police - Traffic Violations* 18.Parente, M. Diakses pada 13 Agustus 2023.

Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. (2014) *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press. Diakses pada 6 Juli 2023.

Khoerudin (20217) Koordinasi Eksternal Dinas Lalulintas dan Angkutan Jalan Tentang Implementasi Sistem Satu Arah di Kota Bogor. Jurnal governansi issn 2442-3971. Diakses pada 12 Juli 2023.

Suaedi, (2011) Analisis situasi pariwisata kawasan puncak. Jurnal Dinamika. halaman 1-27 Vol. 02. No. 2 ISSN 2087-7889. Diakses pada 10 Juli 2023.

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang “ *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*”.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.